

MONITOR BERITA

I

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 17		TAHUN 2006

Industri Curi Listrik

Pasokan Gas PLTGU Priok dan Muara Karang Tersendat

JAKARTA, KOMPAS – PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN berhasil membongkar pencurian listrik yang dilakukan sebuah perusahaan tekstil di Bogor, Jawa Barat. Aksi pencurian dengan modus menyantol pada gardu PLN itu diperkirakan menimbulkan kerugian sampai Rp 9,6 miliar.

General Manajer PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Murtaqi Syamsuddin, yang dihubungi Minggu (26/2), membenarkan adanya temuan tersebut.

PT LLJ, perusahaan tekstil tersebut, diduga telah melakukan aksi pencurian daya listrik selama enam bulan terakhir. "Modusnya, mereka menyantolkan kabel di jaringan tegangan menengah 20 KV sehingga dari sisi pemakaian listrik tidak terukur di meteran listrik," ujar Murtaqi.

Pencurian listrik itu terungkap ketika kontraktor rekanan PLN melakukan pemeriksaan atas gardu induk yang berada di dekat pabrik tersebut. Menurut Murtaqi, pihaknya masih mempelajari kemungkinan ada orang dalam PLN yang terlibat. "Ya, bagaimana bisa mereka *nyantol* ke gardu PLN, kan itu masalahnya," ujar Murtaqi.

Berdasarkan daya kontrak se-

besar 2,77 mega volt-ampere, PT LLJ harus membayar tagihan susulan sebesar Rp 9,6 miliar untuk daya listrik yang dicuri.

Pencurian dengan kerugian sebesar itu pernah terjadi pada tahun 2004. Pelakunya pabrik tekstil juga di Bandung.

Murtaqi mengakui, lemahnya pengawasan pihak PLN menjadi salah satu penyebab pencurian sebesar itu tidak selalu bisa diketahui sesegera mungkin. "Memang aksi pencurian listrik di Jawa Barat oleh industri termasuk cukup banyak," katanya.

Pencurian listrik termasuk bentuk kehilangan daya yang sampai tahun 2005 besarnya masih mencapai 11,44 persen dari seluruh daya yang dihasilkan PLN secara nasional. Selain industri, bentuk pencurian listrik juga kerap dilakukan masyarakat dengan menyantol penerangan jalan. Selain itu pemasangan papan

KASUS PENCURIAN LISTRIK

- ◆ PLN wilayah distribusi Jawa Barat dan Banten tahun 2005 menemukan kasus-kasus pencurian daya listrik dengan total kerugian Rp 78 miliar.
- ◆ Sebanyak 50 pelanggan besar yang melakukan pencurian dari sektor industri dan bisnis. Sekitar 92.000 pelanggan rumah tangga juga melakukan pelanggaran.
- ◆ Jabar-Banten saat ini memiliki 7 juta pelanggan.
- ◆ Modus pencurian listrik, antara lain memperbesar kapasitas pembatas di atas daya kontrak, merusak segel tera, dan penyambungan liar.

reklame juga kerap menggunakan daya listrik secara tidak sah.

Gangguan pasokan

Selain tantangan di sisi transmisi dan distribusi, PLN Jawa bagian Barat juga mengalami masalah di sisi pembangkitan. Kerja PLTGU Priok dan PLTGU Muara Karang, sejak akhir pekan lalu, mengalami gangguan akibat ketersediaan pasokan gas. Akibatnya, PLN harus mengoptimalkan PLTGU Muara Tawar dan pembangkit di Jawa Timur untuk

mengamankan pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya.

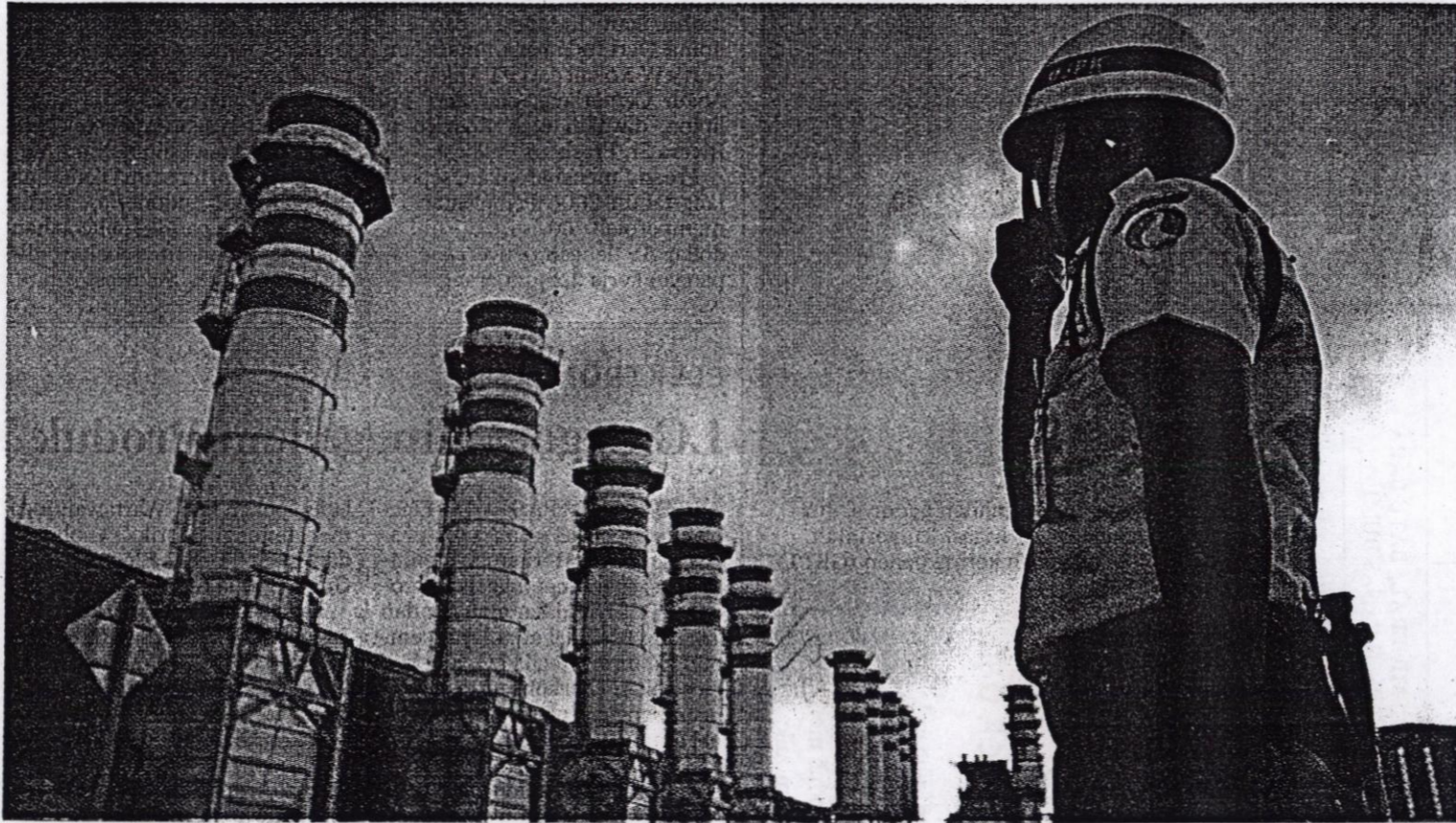
General Manajer Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Muljo Adji, mengemukakan turunnya pasokan gas sampai di bawah 30 juta kaki kubik membuat empat unit gas turbin di PLTGU Priok dan dua unit gas turbin di PLTGU Muarakarang harus dimatikan pada Sabtu lalu.

Menurut Muljo, mesin dimatikan karena pasokan gas untuk PLTGU Priok yang normalnya 200 juta kaki kubik tinggal 25 juta kaki kubik. Adapun Muara Karang dari normalnya 90 juta kaki kubik hanya sekitar 27 juta kaki kubik. "Untung saja pada akhir pekan, beban daya listrik tidak terlalu berat sehingga meskipun ada kekurangan daya sampai 800 MW, tidak sampai terjadi pemadaman," kata Muljo.

Untuk menutupi kekurangan pasokan, PLN mengoptimalkan kerja PLTGU Muara Tawar (920 MW) yang masih memakai bahan bakar solar *high speed diesel* (HSD). PLN juga menambah pasokan daya listrik dari pembangkit-pembangkit di Jawa Timur.

"Terpaksa pakai solar lagi. Kalau tidak, terjadi kekurangan daya listrik di sekitar Jakarta dan Jawa Barat," kata Muljo. (DOT)

1



KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Petugas keamanan melakukan patroli di lingkungan PLTGU Muara Tawar Bekasi, beberapa waktu lalu. Tersendatnya pasokan gas untuk PLTGU Priok dan Muara Karang, pekan lalu, membuat PLN harus mengoptimalkan kinerja PLTGU Muara Tawar (920 MW) yang masih memakai bahan bakar solar *high speed diesel* (HSD), selain menambah pasokan daya listrik dari pembangkit-pembangkit di Jawa Timur.

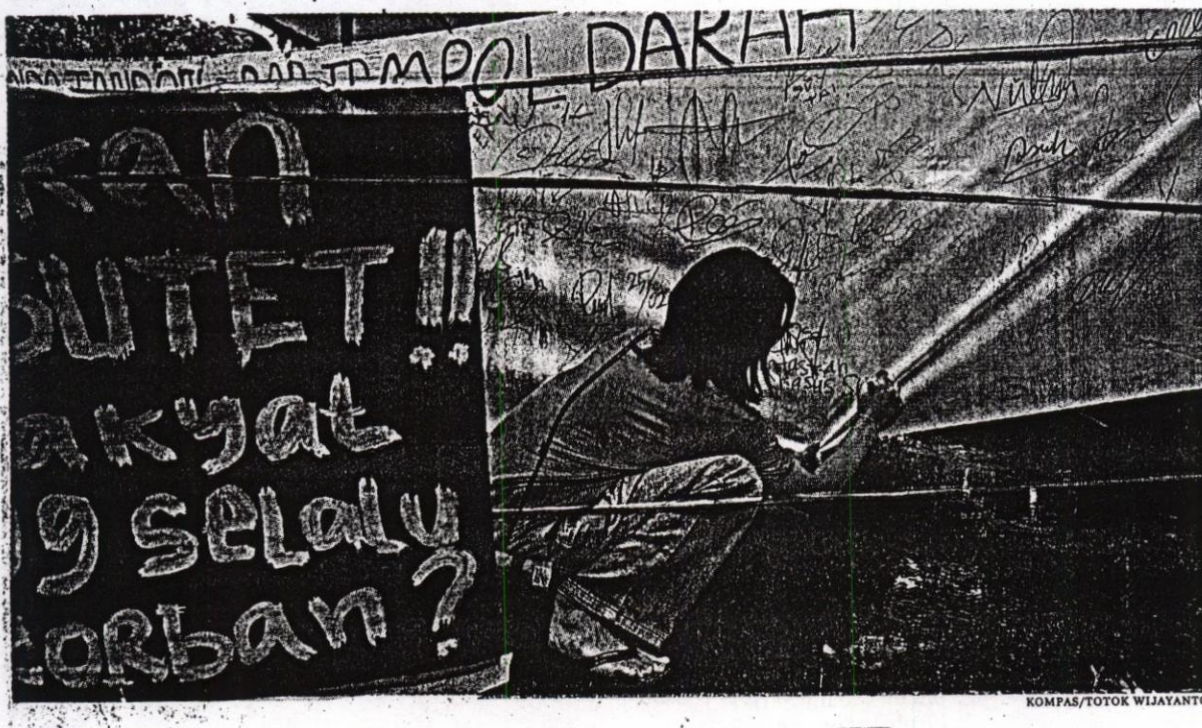
7

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 2		
TAHUN 2006		

Solidaritas terhadap Korban SUTET



Seorang mahasiswa Universitas Nasional Jakarta sedang membubuhkan tanda tangan dan cap jempol darah sebagai tanda solidaritas terhadap korban saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Jakarta, Minggu (26/2). Hingga saat ini urusan ganti rugi untuk para korban SUTET belum juga terselesaikan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 29 30 31

HALAMAN: 27 -

TAHUN 2006

TARIF DASAR LISTRIK

**SPSI Tetap
Tolak Kenaikan**

BEKASI, KOMPAS — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan tetap akan menolak rencana pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik. Kenaikan tarif itu dinilai semakin membebani pekerja yang sebelumnya sudah diprihatinkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Tahun 2006 ini merupakan tahun keprihatinan menyeluruh, menyusul kenaikan harga BBM lebih dari 126 persen. Kenaikan TDL (tarif dasar listrik) akan menjadi keprihatinan menyeluruh bagi dunia usaha, termasuk pekerja," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bekasi R Abdullah, saat memberikan sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-33 Konfederasi SPSI, di Kantor DPC SPSI Kota Bekasi, Minggu (26/2).

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea yang juga Ketua Umum DPP Konfederasi SPSI menyatakan tidak dapat menjamin para pekerja di Indonesia tidak akan melakukan aksi mogok atau unjuk rasa apabila pemerintah tetap menaikkan TDL. Menurut dia, rencana menaikkan TDL seharusnya dibatalkan karena dampak kenaikan harga BBM masih sangat dirasakan kalangan pekerja dan pengusaha. (COK)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

Tersangka Korupsi PLN Bakal Nambah Lima Orang

Jakarta, RM. Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus dugaan korupsi PLTG Borang senilai Rp 122 miliar dan surat bodong BNI senilai Rp 1,7 triliun memberi sinyal akan ada penambahan tersangka atas kedua kasus tersebut. "Kita akan menetapkan tersangka baru," kata penyidik yang ogah disebutkan namanya itu.

Siapa tersangka baru itu, penyidik tersebut ogah membeberkannya. "Yang jelas kita siapkan untuk pekan depan. Dan penetapan

tersangka untuk kedua kasus itu (PLN dan BNI, Red) rencananya

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR (30/1) lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan, akan ada enam orang tersangka baru dari lingkungan BNI. Mereka berasal dari Divisi Internasional, Treasury, dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Seorang dari mereka adalah bekas Kepala Divisi Hukum BNI Tri Kuntoro yang resmi ditahan sejak 11 Februari lalu.

Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam saat ditanya perihal perkembangan kedua kasus itu berjanji tidak akan mempetieskan kasus itu. "Tidak benar jika kasus ini ditiadakan saja, kasus ini jalan terus dan penyidik sedang bekerja keras untuk mengungkap tuntas," ujarnya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

RRC Bantu Atasi Krisis Listrik

CILACAP, (PR),-

Pemerintah RRC berkomitmen akan membantu mengatasi masalah krisis listrik di Jawa-Sumatra dengan membangun tiga pembangkit listrik non-BBM (bahan bakar minyak).

Setelah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, pada tahun 2006 akan membangun lagi tiga pembangkit listrik yakni di Palembang (Sumsel) dengan kapasitas 4 X 600 MW, dan 2 X 90 MW (PLTA) di Asahan Sumut, serta 2 X 150 MW di Jatigede.

Konselor Ekonomi dan Perdagangan Kedubes Cina di Indonesia Tan Wei Wen mengatakan, pemerintah Cina punya komitmen untuk membangun pembangkit listrik berbiaya murah.

"Cina punya komitmen membantu Indonesia mengatasi krisis listrik. Setelah PLTU dioperasikan penuh pada Mei mendatang, ada tiga pembangkit non-BBM lagi yang akan segera dibangun," kata Tan Wei Ten didampingi Presdir PT Sumber Segara Primadaya (S2P), Ilham Rasyid, kepada wartawan, usai uji coba operasi 168 jam nonstop PLTU Karangandri Cilacap, Jateng, baru-baru ini.

Teknologi listrik PLTU ini,

biayanya murah dan kebutuhan dana operasinya juga rendah, serta mampu menghasilkan listrik 2 X 300 MW. Hal ini tentunya sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia yang sedang berupaya melepas ketergantungan pemakaian BBM. Selain itu, juga untuk menghindari kenaikan tarif dasar listrik yang sangat membebani masyarakat.

Di Cina, ungkapnya, pernah terjadi krisis listrik. Untuk itu pemerintah Cina telah mengalokasikan dana besar guna membangun kurang lebih 30.000 MW per tahun selama tiga tahun berturut-turut.

"Pembangunan itu sebagai upaya mengantisipasi krisis listrik di Cina. Meski di Cina juga sedang dibangun pembangkit listrik besar-besaran, tetapi perlengkapan-perengkapan listrik khususnya untuk pembangunan di Indonesia, tidak akan telantar. Hal ini dilakukan karena pemerintah Cina bersepakat menjalin hubungan erat dengan Indonesia," tuturnya.

PLN paling enak?

Pembangunan PLTU skala besar ini, ungkap Tan, dikerjakan oleh putra terbaik Cina, Chengda Engineering Corporation selaku pelaksana proyek bersama PT Sumber Segara Primadaya. Dalam hal ini,

hanya dalam tempo 21 bulan telah selesai pembangunan proyek PLTU yang menghasilkan listrik 2 X 300 MW.

Proyek tersebut berlangsung cepat dari 24 bulan yang dijadwalkan. Rencananya pembangkit unit I dan II selesai dan mulai dioperasikan secara maksimum pada akhir Mei 2006.

Sebelumnya Tan mengaku risau dengan pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan proyek PLTU Cilacap berbau korupsi, berpotensi menjadi kredit macet, dan listrik yang dihasilkan tidak berkualitas. Hal itu, menurutnya tidak benar, sebab setiap saat ia meninjau langsung, apa yang diberitakan di media jauh berbeda.

Tan juga membantah isu mengenai adanya korupsi dalam proyek tersebut. Demikian halnya dengan berita kredit macet, itu salah. Mengenai PLTU yang tidak berkualitas, Tan meragukan pendapat itu. Alasannya, teknologi pembangkitan 300 MW sudah dikuasai para ahli Cina sejak tahun 1980. "Cina mampu membangun 30.000 MW per tahun. PLTU Cilacap dibangun investor Cina dan Indonesia. Biaya pembangunan PLTU sebagian ditanggung BNI," kata Tan. (A-99)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

Masalah di PLN Terkait Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Dito Ganindito mengatakan masalah yang dihadapi PLN terkait dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya interdept. Pasalnya, hal terberat yang dihadapi PLN adalah masalah pemakaian energi, yang terkait dengan kebijakan energi dari pemerintah.

"Jadi, bukan semata-mata misajemen dalam tubuh PLN. Dengan kata lain, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kinerja PLN," kata Dito di Jakarta, Minggu (26/2).

Beberapa even besar memang menuntut ketersediaan pasokan energi listrik yang andal, misalnya Pekan Olah Raga Nasional (PON) bisa berlangsung sukses di Sumsel, karena dukungan keandalan pasokan listrik. Walaupun belakangan muncul kasus hukum terkait PLTG Borang di Sumsel.

"Pada kasus Borang, kita setuju diselidiki secara tuntas. Tapi, ada persoalan besar lainnya yang membebani PLN menurut saya adalah masalah energi. Bisa ini bisa diselesaikan, saya yakin PLN bahkan tak perlu mendapat subsidi pemerintah," kata Dito.

Empat Langkah

Sementara itu, pengamat kelistrikan Okky Setiawan mengatakan sekurangnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan PLN.

Pertama, mematok (*hedging*) kurs dolar bagi PLN. Hal ini dilakukan untuk memberi kepastian dan melindungi PLN dalam jangka panjang dari fluktuasi nilai ru-

piah terhadap dolar AS.

Menurut Okky, hal ini harus segera diputuskan mengingat pemerintah melalui PLN akan menender 7 proyek listrik swasta.

Langkah kedua, kata Okky memberi alokasi BBM dengan harga bersubsidi. "Hingga saat ini, beban terbesar PLN adalah harga BBM. Jadi, alokasi subsidi bagi PLN cukup diberikan dalam bentuk pemberian BBM murah," kata dia.

Langkah ketiga, kata dia yang merupakan langkah ekstrim adalah melakukan privatisasi terhadap PLN. Hal ini, kata Okky bukan untuk menggadaikan PLN yang merupakan aset negara, namun untuk membuat BUMN ini lebih sehat dan transparan.

"Untuk apa dibanggakan sebagai 100% perusahaan negara, kalau ternyata tidak efisien dan terus merugi," katanya. Dia ambil contoh kinerja sejumlah BUMN yang membaik, setelah privatisasi dilakukan, misalnya PGN, Aneka Tambang dan Timah.

Langkah keempat, menurut dia dilakukan apabila ketiga langkah di atas tidak bisa dilakukan, adalah mengurangi intervensi berlebihan dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Harian Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN Edhi Wigoro mengatakan pembenahan di tubuh PLN ini hendaknya diikuti oleh pembenahan manajemen. "Tentunya manajemen yang memiliki visi dan misi yang kuat untuk memajukan PLN," kata Edhi. Manajemen PLN, itu, tambah Edhi, idealnya tetap dipegang oleh kalangan internal PLN. (es)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

“Kalau Nolak TDL Listriknya Diputus”



Fahmi Idris

Jakarta, RM

Pemerintah mempersilahkan dunia usaha untuk menyatakan penolakan dan penerimaan atas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang rencananya akan naik Mei atau Juni mendatang sebesar 15-20 persen.

“Nggak apa-apa kalau memang mereka tetap menolak, silahkan saja. Tapi baiknya sih jangan begitu. Dari pada nolak, lebih baik berunding. Saya kan sudah jelaskan kalau untuk kalangan industri, pake mekanisme *Business to Business* (B to B),” ujar Fahmi menjawab pertanyaan *Rakyat Merdeka* soal penolakan Kadin Indonesia atas rencana kenaikan TDL, usai

melakukan pertemuan dengan kalangan industri elektronik di Jakarta, Jumat.

Fahmi menegaskan, pemerintah meminta kepada dunia usaha untuk segera melakukan dan membuka dialog dalam pola B to B agar diperoleh keputusan yang dapat diterima semua pihak.

“Konsep kami sendiri tegas, yaitu untuk kalangan industri dalam penentuan besaran kenaikan TDL ditentukan lewat pola B to B. Dengan demikian dapat dibicarakan tarif yang tepat dan kualitas mana yang harus ditetapkan. Yang pasti, perundingan adalah cara yang ideal,” jelas Fahmi.

Namun Fahmi menyayangkan jika kalangan industri tetap menolak, karena menurutnya hal tersebut bisa menjadi kontra-produktif. “Lah kalau pemerintah tetap menaikkan TDL dan mereka tetap menolak atau bahkan nggak bayar, bisa saja kan diputus listriknya. Coba, kalau Anda nggak bayar listrik, bisa diputus itu, ia kan! Jadi dialog lah,” pinta Fahmi.

Fahmi menyatakan, persoalan kenaikan TDL kewenangannya ada di Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dirinya berkepentingan karena industri akan terkena dampaknya akibat dari kenaikan TDL. ■ IU

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPASS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 29 30 31		
HALAMAN : 19		TAHUN 2006

PT LLJ Dituduh Mencuri Listrik Rp 9,6 Miliar

BOGOR, (PR).-

Satgas Penertiban Pema-
kiaan Tenaga Listrik (P2TL)
PLN Area Pelayanan Jaringan
(APJ) Bogor membongkar
pencurian listrik yang di-
lakukan PT LLJ di kawasan
Gunung Putri, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor,
Jumat (24/2) lalu. Akibat pen-
curian itu PLN dirugikan
sebesar Rp 9,6 miliar. Nilai
kerugian ini merupakan terbe-
sar di Indonesia.

Keterangan yang berhasil
dihimpun menyebutkan, Sat-
gas P2TL melakukan pemeli-
haraan gardu-gardu PLN se-
jak 19 Februari 2006 lalu.
Pemeliharaan tersebut dimak-
sudkan untuk menjaga kean-
dalan listrik. Saat melakukan
pemeliharaan Satgas dan
aparatus kepolisian menemukan
adanya indikasi pencurian
listrik yang dilakukan PT LLJ.

Setelah melakukan penye-
lidikan, petugas melakukan
penggerebekan yang dibantu
aparatus Polsek Gunung Putri

terhadap PT LLJ. Ternyata,
kecurigaan petugas terbukti.
PT LLJ melakukan modus
pencurian dengan menyadap
pada jaringan tegangan
menengah 20 Kv. Dalam gar-
du pada sisi sebelum titik pen-
gukuran, PT LLJ menyadap
energi listrik sehingga tidak
terukur oleh PLN.

Selanjutnya petugas P2TL
PLN ASPJ Bogor melakukan
penelusuran secara mendalam
terhadap gardu PT LLJ.
Dengan menggunakan alat de-
teksi milik PLN, petugas men-
emukan penyadapan listrik
pada sisi tegangan menengah
PLN dengan cara mengopel
kabel TM di titik terminasi ku-
bikel sebelum pengukuran.
Petugas juga menemukan ka-
bel yang digunakan tersebut
menuju travo 2 MVA yang
telah terpasang pada instalasi
listrik PT LLJ.

Manajer APJ Bogor Khairil
Wahyuni saat dikonfirmasi
membenarkan pencurian
tersebut. (D-22/D-11) ***

8

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2006

Pabrik Tekstil Curi Listrik, Negara Rugi Rp 9,6 Miliar

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN Cabang Bogor berhasil mengungkap pencurian aliran listrik terbesar yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 9,6 miliar. Pencurian ini dilakukan oleh pabrik tekstil PT Limas Lestari Jaya (LLJ).

Kepala Cabang PT PLN Bogor Khairil Wahyudi ketika dihubungi *Suara Karya* semalam membenarkan bahwa kasus pencurian aliran listrik ini berpotensi merugikan negara. "Kasus ini sudah kami teruskan untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian," katanya.

Dijelaskannya, pencurian itu dilakukan dengan cara penyadapan di sistem 20 kilovolt (kv) milik PLN. Kasus ini terungkap bermula dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pihak PLN pada Jumat (24/2) malam. Saat itu, pada salah satu gardu milik PLN ditemukan sebuah kabel yang terkoneksi dengan salah satu terminalnya.

Petugas PLN kemudian melakukan penyusuran aliran jalan kabel tersebut hingga ke pabrik milik PT Limas Lestari Jaya yang diketahui sebagai pabrik pemintalan benang yang memiliki daya kontrak sebesar 2,77 Mva.

Mengetahui kabel tersebut terhubung dengan lokasi pabrik tersebut, maka petugas PLN berusaha untuk masuk dan mengetahui lebih lanjut. "Namun, salah satu karyawan pabrik menolak petugas

PLN untuk masuk ke lokasi," kata Khairil.

Karena mendapat kesulitan tidak bisa memasuki lokasi pabrik, petugas pihak PLN kemudian meminta kepolisian setempat untuk membantu agar proses pemeriksaan dapat tetap dijalankan. "Kami bersama pihak kepolisian akhirnya berhasil masuk lokasi," katanya.

Khairil mengatakan, di lokasi pabrik, pihaknya menemukan sebuah genset dan sebuah ruangan yang terkunci dan diindikasikan sebagai tempat asal kabel yang berhubungan dengan gardu milik PLN. "Hasilnya kami temukan travo sebesar 2 Mva yang digunakan untuk menyalahgunakan aliran listrik PLN," katanya.

Menurut rencana, kata Khairil, PLN Bogor bersama dengan kepolisian akan meneruskan kasus ini untuk diusut lebih lanjut sesuai dengan hukum yang ada.

Ia memberikan jaminan, jika ada oknum PLN yang terlibat maka akan dilakukan tindakan tegas dengan pemecatan secara tidak hormat. Sedangkan untuk kasusnya sendiri, ia mengharapkan agar dilakukan

tindakan pidana dan segera dapat dilakukan pembayaran tagihan susulan sesuai dengan besaran aliran listrik yang sudah disalahgunakan. Dalam hal ini, PLN Bogor sudah mempunyai hitungan yang baku sehingga secara langsung bisa menetapkan jumlah tagihan susulan yang dibebankan kepada pabrik tersebut senilai Rp 9,6 miliar.

Dijelaskannya, pihaknya telah membuat berita acara yang disaksikan oleh pihak kepolisian dan disepakati oleh salah satu karyawan pabrik PT Limas Lestari Jaya.

Menurut Khairil, kasus ini bukan yang pertama terjadi di wilayah kerja Cabang PT PLN Bogor. Hanya, kasus yang terjadi pada pabrik tekstil tersebut merupakan kasus pencurian listrik terbesar yang berhasil diungkap oleh pihak PLN. "Kita tidak akan berhenti untuk selalu melakukan kegiatan penertiban serupa agar masalah ini tidak merugikan negara," ujarnya.

Sampai semalam, pihak PLN belum menjelaskan secara rinci alamat pabrik PT Lima Lestari Jaya. *Suara Karya* coba mengkonfirmasi kasus itu kepada pihak kepolisian di Bogor, namun belum mendapat tanggapan. Kasatreskrim Polres Kota Bogor AKP Iwan Ridwan SH tidak dapat dihubungi melalui telepon genggamnya. Begitu pula dengan Kasatreskrim Polres Kabupaten Bogor Iptu Sugeng Supriyanto. (Rully/Tarwono)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI																												
		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 2												TAHUN 2006																		

Menyoroti Rencana Kenaikan TDL

Bola panas telah dilemparkan PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang mengisyaratkan akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Rencana kenaikan TDL ini tidak tanggung-tanggung, diperkirakan mencapai 30% - 80%. Di tengah situasi sulit ekonomi masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditambah dengan melonjaknya harga beras dan gula pasir, akhir tahun lalu, kenaikan TDL jelas sangat memberatkan masyarakat.

Keputusan menaikkan TDL yang direncanakan akan diberlakukan mulai Maret bulan depan, jelas merupakan kebijakan yang tidak populer di mata rakyat. Memang, kebijakan itu terpaksa diambil, antara lain karena didorong keinginan pemerintah untuk mengurangi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lantaran tingginya subsidi negara kepada PLN sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Dengan menaikkan harga TDL maka beban subsidi negara tersebut bisa dibebankan kepada rakyat penggunaannya.

Permasalahannya, belajar dari kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 lalu, dampak yang ditimbulkan cukup berat. Karena, kenaikan tersebut ternyata diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa. Apalagi, karena kenaikan BBM dilakukan pada waktu yang tidak tepat (menjelang bulan Ramadhan tahun lalu) hingga mengakibatkan inflasi.

Di lain pihak, kenaikan BBM rata-rata mencapai lebih dari 100 persen telah membuat masyarakat *shock*. Berbagai kisah tragis, seperti kasus bunuh diri

karena kesulitan ekonomi, merebaknya aneka penyakit akibat gizi buruk, dan lain-lain pun sempat mencuat di media massa.

Kita semua mengetahui bahwa inflasi bulanan telah mencapai angka rekor, 8,7%, suku bunga naik, dan pengangguran serta kemiskinan bertambah dengan cepat. Data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) pada Oktober 2005 menyebutkan, angka pengangguran tercatat 11,6 juta jiwa dan jumlah rakyat miskin mencapai 36-37 juta jiwa. Dengan kondisi ini, laju ekonomi pun praktis terhambat. Dari sisi pemerintah sendiri ternyata harus mananggung beban pengeluaran yang cukup besar akibat naiknya belanja negara dan bunga utangnya.

Dalam kondisi beban masyarakat semakin berat, keputusan menaikkan TDL menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat. Dapat dipastikan pula bahwa kenaikan TDL tersebut akan berimbas pada kenaikan harga-harga dan barang kebutuhan pokok, yang sudah barang tentu akan semakin menghimpit masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kebijakan itu bisa mendatangkan penilaian bahwa pemerintah cenderung tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Karena, kebijakan meminimalkan atau mengurangi beban subsidi negara untuk kemudian mengalihkannya sebagai beban di pundak rakyat, jelas kian menyengsarakan rakyat.

Oleh Puji Hartanto

Kalau mau jujur, kenaikan tarif dasar listrik sebenarnya dapat dicegah sejak dini apabila kegiatan in-efisiensi, biaya tinggi dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di tubuh PLN dapat diantisipasi. Sayangnya, hal tersebut tidak dilaksanakan dengan serius, sehingga meng-

Dalam kondisi beban masyarakat semakin berat, keputusan menaikkan TDL menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat.

akibatkan inflasi yang cukup besar. Dugaan praktik korupsi yang terjadi di tubuh PLN membuktikan bahwa selama ini hukum belum dapat diposisikan sebagai landasan moralitas dan *ordinate*, melainkan sebagai *sub-ordinate* yang boleh direayasa dengan berbagai cara untuk tujuan tertentu.

Hukum menjadi tidak berarti, sepanjang menjadi penghalang pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, hukum menjadi dipuji dan dipuja bagaikan dewa manakala penerapan hukum tersebut dapat menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok masyarakat tertentu. Supremasi hukum pun akhirnya menjadi "mati suri".

Oleh karena itu, akan sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengharapkan masyarakat dapat memahami secara detail, atas beban yang harus dipikulnya, sekalipun pemerintah, termasuk lewat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali meminta pengertian masyarakat luas atas keputusan pahit diambilnya. Dengap kondisi yang ada, masyarakat justru bisa semakin yakin bahwa pemerintah kurang serius dalam memberantas praktik korupsi. Masyarakat bisa juga beranggapan bahwa pemerintah telah sengaja membiarkan para pejabat pemerintah melakukan praktik-praktik korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan SBY-JK bisa dinilai masih sebatas pada dataran "pengumpulan fakta". Dan, itu pun tidak tertutup kemungkinan masih banyak daftar isian yang dimanipulasi.

Belajar dari kebijakan pemerintah membuat keputusan menaikkan harga BBM yang sangat memojokkan rakyat miskin, maka kebijakan kenaikan TDL pun akan berdampak kian menyudutkan rakyat. Dhus, kenaikan TDL akan menghalang popularitas dan citra pemerintah di mata masyarakat luas. Bisa saja muncul anggapan bahwa pemerintah lebih tunduk pada negara-negara donor pemberi bantuan, daripada kepada rakyat. Pemerintah bisa dinilai tidak lagi membela rakyat sebagai kaum yang sudah lama tertindas perubahan dunia.

Satu hal lagi penting untuk dicatat bahwa kenaikan harga TDL jelas akan berpengaruh besar terhadap sektor industri nasional. Sektor industri sebagai kontributor terbesar dalam struktur PDB kita, telah terpukul akibat kenaikan harga BBM lalu. Dengan kebijakan baru kenaikan TDL, dapat dipastikan dunia industri akan semakin terpuruk. Boleh jadi, mereka akan kehilangan daya saing, sehingga bukan tidak mungkin pasar domestiknya akan diisi oleh pihak asing. Sementara pasar eksportnya lepas karena tingginya biaya produksi yang tak mampu lagi dapat di-cover oleh dunia usaha dalam negeri. Oleh karena itu, wajar-wajar saja manakala sebuah asosiasi industri mengancam akan memboikot pembayaran listriknya kepada pihak PLN jika TDL benar-benar dinaikkan dalam porsi yang cukup tinggi.

Kengototan untuk tetap menaikkan TDL bisa jadi akan mendatangkan penilaian negatif terhadap pemerintah. Pemerintah bisa saja dinilai cenderung menutup mata, telinga dan hati tanpa mau memahami kesulitan masyarakat. Yang kita harapkan, kebijakan-kebijakan pemerintah idealnya senantiasa tidak semakin membebani masyarakat. Kalau kebijakan kenaikan TDL benar-benar akan memberatkan rakyat, maka kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara matang untuk menghindari agar rakyat tidak lagi menjadi korban yang selalu dirugikan. ***

*Penulis adalah Direktur Lembaga
Kajian Kutub (LKKY,
Yogyakarta.*

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7.

TAHUN 2006

Konsumsi Lampu Hemat Energi Naik 28,5%

JAKARTA - Konsumsi lampu hemat energi pada tahun ini diperkirakan meningkat 28,5% dibandingkan tahun lalu menjadi 90 juta unit. Pertumbuhan konsumsi tersebut dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang akan diterapkan pemerintah tahun ini.

"Kenaikan TDL yang dapat dipastikan terjadi tahun ini membuat masyarakat akan lebih memilih lampu hemat energi," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo) John Manoppo di Jakarta, Jumat (24/2).

Menurut data Aperlindo, konsumsi lampu hemat energi meningkat setiap tahun. Pada 2004, konsumsi lampu jenis ini mencapai 60 juta unit, kemudian meningkat menjadi 70 juta unit pada 2005.

"Tahun ini konsumsi lampu hemat energi diperkirakan naik menjadi 90 juta unit. Sedangkan produksi lampu hemat energi domestik hanya mencapai 30 juta unit yang dihasilkan dari lima perusahaan," tutur John.

John menambahkan, peningkatan konsumsi itu seiring dengan peningkatan impor lampu hemat energi. "Impor lampu hemat energi pada 2004 mencapai 48,12 juta unit, dan tahun 2005 diperkirakan meningkat menjadi 50,8 juta unit," ucapnya.

Seiring pemberlakuan harmonisasi tarif bea masuk (BM) tahap kedua, menurut John, impor lampu hemat energi diperkirakan kian menurun. "Produksi di dalam negeri akan lebih murah dan efisien daripada impor, sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif," ucapnya.

Pemerintah awal tahun ini mengeluarkan paket harmonisasi tarif tahap kedua. Pemerintah menaikkan bea masuk (BM) lampu hemat energi dari 5% menjadi 15%. BM lampu hemat energi akan diturunkan kembali pada 2010 menjadi 10%.

John Manoppo menjelaskan, kenaikan BM lampu hemat energi juga akan memicu investasi di dalam negeri. "Sektor ini masih sangat potensial untuk dikembangkan," paparnya.

Berdasarkan data Aperlindo, dari 109 merek lampu hemat energi yang tercatat, baru 16 merek lampu yang memiliki Sertifikat Nasional Indonesia (SNI). Ke-16 merek itu di antaranya Ace, Aultech, Bess, Chiyoda, dan Focus. Sedangkan 20 merek lampu hemat energi segera mendapatkan SNI, di antaranya Megaman, Augen, Fujilight, Futachi, dan Krypton. (c83)

Peta Industri Lampu Hemat Energi (LHE)

No.	Nama Perusahaan	Produksi LHE (dlm juta unit)	Jumlah Pekerja	Investasi (Ribu US\$)
1.	PT Sinar Angkasa Rungkut	10	3.500	115.000
2.	PT Hikari	5	700	25.000
3.	PT Matsushita Lightning Indonesia	5	950	50.000
4.	PT Sinko Prima Alloy	5	200	2.000
5.	PT Nikkatsu Electronic Works	5	200	2.000

Sumber: Aperlindo, diolah

11

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

PENGANGGURAN BAKAL MBLUDAK

DPRD Malang Resmi Tolak TDL

Jakarta, RM. Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15-20 persen pada Mei mendatang, ditolak pengusaha dan DPRD Malang, secara terpisah kemarin.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Sutrisno menegaskan, pihaknya menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan TDL Mei mendatang. "Kita tetap menolak," katanya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah tak memaksakan untuk menaikkan TDL. Sebab, kenaikan ini akan semakin membebani kalangan usaha dan bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan gulung tikar. "Akan banyak perusahaan yang gulung tikar dan terjadi pengangguran," cetusnya.

Menurut dia, bila banyak perusahaan yang gulung tikar maka akan berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak. Jumlah pendapatan dari sektor pajak akan menentukan besarnya subsidi dalam APBN.

"Nah, kalau kita mati (bangkrut—red) karena TDL naik, maka penerimaan pajak pemerintah juga turun. Kalau penerimaan pajak turun, apakah

pemerintah mampu memberikan subsidi sebesar Rp 17 triliun. Subsidi itu baru dianggarkan, duitnya belum ada," papar Benny.

Sementara itu, DPRD Malang secara resmi menolak kenaikan TDL. Penolakan ini diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar Jumart (25/2). "DPRD Kota Malang, secara resmi menolak rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik," kata Ketua DPRD Kota Malang, Priatmoko, kemarin.

Dalam rapat paripurna, hampir semua fraksi sepakat untuk menolak kenaikan TDL ini. Hanya, Fraksi Partai Demokrat yang dalam pandangannya menyatakan bisa menerima langkah pemerintah menaikkan TDL.

Menurut Priatmoko, rencana pemerintah menaikkan TDL dinilai sangat memberatkan masyarakat. Apalagi masyarakat sudah banyak yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

"Kalau TDL dinaikkan juga masyarakat akan tambah susah," ujarnya.

DPRD Malang, lanjut dia, akan segera melayangkan surat penolakan kenaikan TDL ini ke DPR RI. Diharapkan, Diharapkan, DPR bisa segera menyikapi kenaikan TDL ini.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparmo memintar agar kenaikan TDL ini bisa ditunda. Namun bila kenaikan ini tak dapat lagi dihindari, maka sebaiknya kenaikannya tak lebih dari 20 persen. ■ IMI/JPNN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

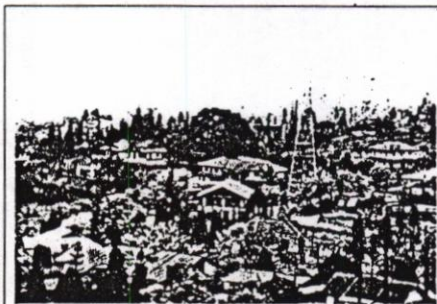
TAHUN 2006

Korban SUTET?

BERLANJUTNYA aksi korban SUTET seharusnya direspons pemerintah, PLN, atau instansi terkait. Jangan biarkan kasus itu berlarut-larut. Selain itu, perlu diintensifkan sosialisasi iklan layanan masyarakat bahwa tidak ada penyakit yang disebabkan radiasi SUTET.

Media penyampaiannya jangan hanya televisi, melainkan juga disebar luas melalui media cetak, pamflet, dan selebaran agar lebih banyak masyarakat memahami dan meyakini penyampaian "pesan" Profesor Corrie Wawolumaa dalam pariwara bahwa tidak ada bukti SUTET menyebabkan penyakit bagi mereka yang berdiam di bawahnya.

Langkah ini penting untuk mengantisipasi meluasnya pemahaman sesat dan menyesatkan yang sengaja dikembangkan oleh kelompok



WISNU PRABOWO

► Rumah di bawah tiang listrik tegangan tinggi

kepentingan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Buktinya, belum lama ini, Ahad 5 Februari, pos koordinasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, didatangi puluhan anak-anak yang mengalami kelainan fisik. Ironisnya, para orangtua meyakini anak mereka itu mengalami kelainan karena pengaruh SUTET.

Mereka mestinya tidak dieksploitasi. Kasihan, mereka hanya "dimanfaatkan" untuk mencari dukungan. Secara fisik, tentu belum siap untuk berjemur di bawah terik matahari, basah ketika hujan, dan melawan udara dingin di waktu malam.

Akan lebih baik jika anak cacat itu dibawa ke polisi dan minta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa dan divisum dokter. Kalau dinyatakan benar radiasi SUTET sebagai penyebabnya, maka menjadi hak masyarakat melakukan perlawanan hukum dan minta ganti rugi kepada PLN. Bila tidak, insyallah, agar tak mengeksploitasi anak-anak dan diprovokasi pihak-pihak tertentu.

ANITA SYARIFUDDIN

- Wisma Tamara

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24

Jakarta 12920

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 90

TAHUN 2006

Dengan Surya Mengatur Jalan

Pemerintah Kota Yogyakarta menggagas pemakaian energi surya untuk menjalankan lampu pengatur lalu lintas. Tak lagi bergantung pada setrum PLN.

BEGETU tombol dipencet, kain yang menutupi konstruksi panel surya seharusnya melorot. Tapi, meski ditekan berulang-ulang, kain berwarna hijau itu tetap *ngyel*. Herry Zudianto, Wali Kota Yogyakarta yang memencet tombol, cuma bisa mesam-mesem. Adegan pada peresmian penggunaan lampu lalu lintas bersumber energi surya di Balai Kota Yogyakarta, Jumat dua pekan lalu, itu tak pelak mengundang tawa.

Beberapa saat ditunggu, kain bandel itu baru jatuh. "Lha... *saiki malah tibo dewe* (sekarang malah jatuh sendiri)," gurau seorang pejabat pemerintah kota. Acara pun bergulir mulus. Lampu lalu lintas (*traffic light*) dengan energi matahari resmi beroperasi. Untunglah ia tak macet seperti kain yang menyelubunginya. "Lampu berenergi surya ini merupakan terobosan atas upaya mencari energi alternatif," kata Herry.

Meski baru dipakai satu, pada *traffic light* di dekat balai kota, Herry optimistis

energi surya dapat diterapkan di seluruh kota Yogyakarta. Sejak 2001, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penghematan energi listrik, mulai pemasangan kWh meter pada penerangan jalan hingga memakai lampu hemat energi. Namun beban rekening tak sebanding dengan berbagai upaya itu, lantaran tarif listrik melonjak saban tahun. Belum lagi persoalan byar-pet yang sering membuat kacau perempatan jalan.

Maka, dicarilah alternatif lain. Pemerintah kota menggandeng Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE-UGM) untuk menjalankan proyek ini. Langkah pertama, mencari sumber listrik untuk lampu lalu lintas. Pilihan jatuh pada energi surya. Alasannya sederhana. "Matahari adalah sumber energi yang tak akan pernah habis," kata Sudiartono, 53 tahun, Wakil Kepala PSE-UGM. Alasan lain, mereka sudah lama bergaul dengan matahari.

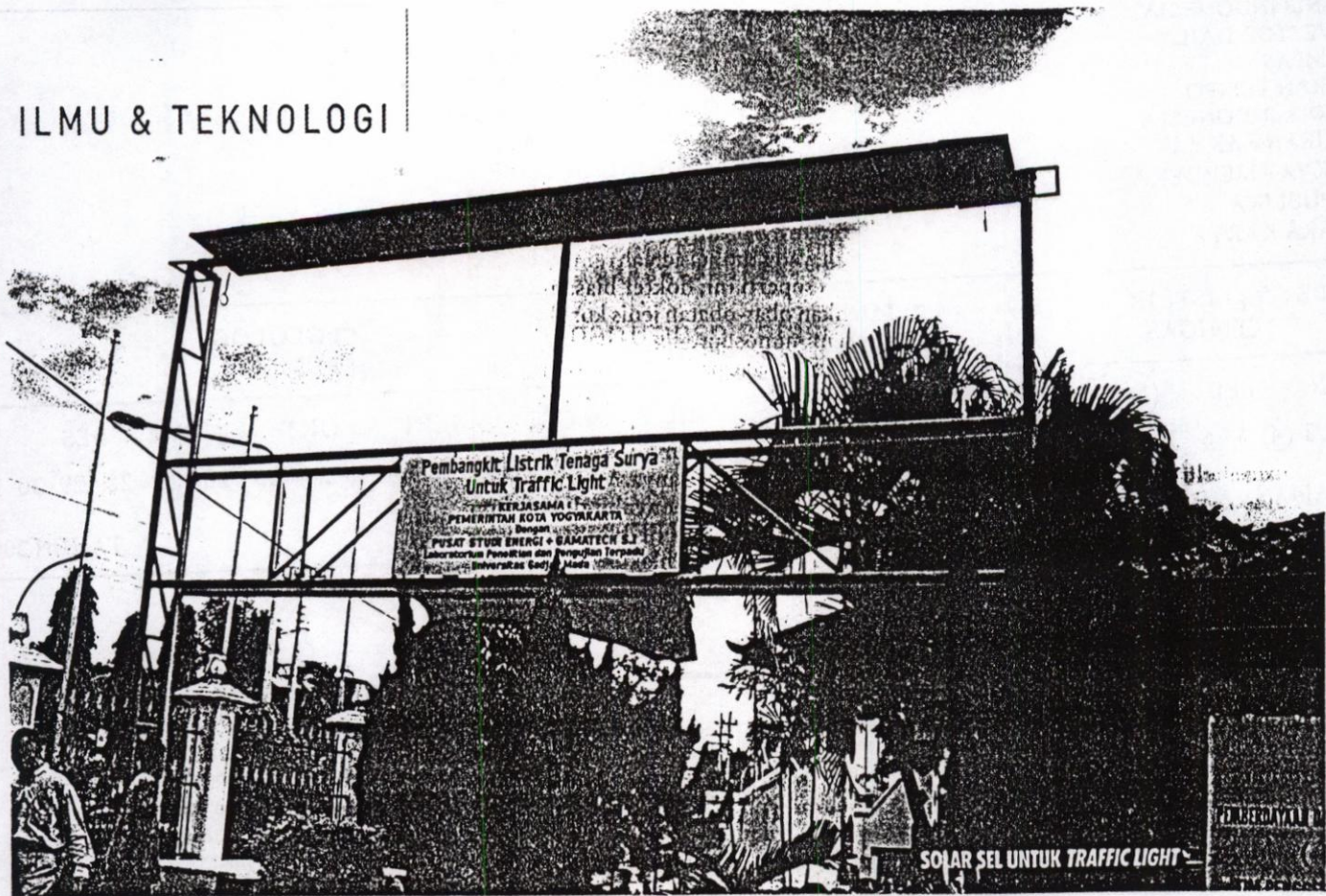
Sudiartono, kordinator proyek ini, bergelut dengan energi surya sejak 1987.

Lulusan S-2 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Geofisika UGM, itu telah memakai sinar matahari mulai dari anak Gunung Krakatau hingga Waduk Kedungombo (lihat: *Listrik dari Parit*). PSE juga sudah membuat lampu penerangan jalan di muka kantornya dengan menyedot energi surya. "Jadi, tak sulit menerapkannya ke sistem *traffic light*," kata Sudiartono.

Desember lalu, proyek ini dimulai. PSE mendatangkan 14 panel surya dari Jerman senilai Rp 42 juta. Masing-masing panel berukuran 90 x 60 sentimeter dengan kekuatan 50 Wp (wattpeak). Panel surya ini dipasang di halaman Balai Kota Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberi energi lampu lalu lintas pada perempatan jalan di ujung selatan Jalan Timoho.

Panel surya dipasang mendarat pada struktur tiang besi setinggi 6 meter. Dengan sistem *photo voltaic*, panel-panel ini menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Arus setrum kemudian disimpan di tujuh unit aki 100 ampere hours (AH) yang bertegangan 12 volt. Setiap aki memperoleh pasokan setrum dari dua panel surya. Sebelum sampai di aki, arus listrik diarahkan lebih dulu ke sebuah pengontrol (*hybrid controller*). Alat ini berfungsi otomatis memindahkan sum-

ILMU & TEKNOLOGI



ber energi ke jaringan listrik PLN bila setrum dari aki tekor.

Dari pengontrol listrik, jaringan setrum langsung masuk ke pengontrol lampu lalu lintas (*traffic light controller*). Agar setrum dari sang surya irit, PSE mengganti lampu pijar 100 watt pada lampu pengatur lalu lintas dengan lampu LED (*light emitting diode*) 8 watt. Seluruh rangkaian ini mampu menyalakan lampu LED *traffic light* yang hanya perlu arus 4 ampere.

Rangkaian lampu lalu lintas energi surya itu, menurut Sudiartono, mampu menghasilkan daya listrik 1.500 watt setiap hari dengan penyinaran 4-6 jam. Padahal, untuk menyalakan *traffic light* hanya butuh 860 watt. Sisa setrum ditabung di baterai sehingga bila tak ada pasokan listrik dari panel surya, lampu lalu lintas tetap bisa menyala selama satu minggu.

Setelah dicoba, listrik yang tersimpan di aki tak pernah tekor. Karena itu, pada 16 Januari 2005, PSE mencabut penghubung otomatis listrik dengan PLN. "Jadi, *traffic light* ini murni bertenaga matahari," kata Sudiartono. Sejauh ini, tak ada masalah. Pernah satu kali lampu lalu lintas padam karena tim PSE alpa memasang



kabel *ground*. Meski mampu memberi daya 1.500 watt per hari, pembangkit listrik ini tak ekonomis bila diterapkan di rumah tangga, lantaran peralatan elektronik rumah tangga terlalu rakus melahap setrum.

Menurut Sudiartono, penggunaan energi surya pada lampu lalu lintas saat ini hampir sama dengan biaya listrik yang dikeluarkan pemerintah kota. Masalahnya, harga panel surya terlalu mahal lantaran belum bisa diproduksi di dalam negeri. Untuk satu lampu lalu lintas, beban listrik per bulan sebesar Rp 500.000-an. Sementara biaya pembangunan *traffic light* surya besarnya Rp 65 juta. Bila dibagi masa pakai 10 tahun, beban bulanan lampu lalu lintas surya tak jauh beda dengan *traffic light* PLN.

Namun, bila tarif listrik menanjak terus, lampu lalu lintas surya akan jadi ekonomis. Keuntungan lain, ongkos perawatan *traffic light* surya sangat kecil. "Cuma mengecek dan mengisi air aki," kata Sudiartono. Dari proyek ini, pemerintah kota berancang-ancang menerapkannya pada seluruh *traffic light* dan lampu penerangan jalan umum di Yogyakarta. □

SIGIT INDRA DAN SAWARIYANTO

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 91

TAHUN 2006

Listrik dari Parit

PUSAT Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE-UGM) sepertinya bakal kebanjiran order. Saat meresmikan pemakaian lampu pengatur lalu lintas berenergi surya, Jumat dua pekan lalu, Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto, merencanakan memakai energi surya pada seluruh *traffic light* di Yogyakarta yang berjumlah 61 titik. "Kita lihat enam bulan ke depan apakah peralatan ini bisa berjalan dengan baik," kata Herry.

Selama kurun itu, Herry berharap ada cara lain untuk menghemat ongkos pembangunan panel surya. Maklum, panel buatan Jerman itu harganya Rp 42 juta untuk menyalakan delapan lampu di satu perempatan. Bagi PSE-UGM, ini merupakan tantangan tersendiri. "Kami akan mencoba sekuat tenaga," kata Sudiartono, Wakil Kepala PSE-UGM. Bagi PSE, proyek lampu pengatur lalu lintas bukan peranti pertama mereka yang menggunakan tenaga matahari.

Pada 1992, PSE mendesain sistem penyerapan tenaga surya di Pulau Krakatau, daerah terpencil yang tak tersentuh setrum-PLN. Pembangkit listrik tenaga surya itu dipakai untuk menjalankan seismometer, alat pemantau gempa di Pulau



SUDIARTONO

Panaitan di Samudra Indonesia, Kalianda di Lampung, dan Pantai Carita di Jawa Barat. Dari peralatan di tiga daerah yang mengepung Gunung Krakatau itu, sinyal aktivitas gempa dikirim ke komputer pusat pendeteksi gempa di Carita Beach Hotel.

Sistem pemantau jarak jauh itu juga diterapkan untuk memantau ketinggian air di Waduk Sermo, Wates, dan Kedungombo, Boyolali. Tak cuma proyek gede, PSE juga menekuni proyek kecil. Misalnya lampu jalan bertenaga surya. Dua panel surya, masing-masing berkekuatan 80 Wp (wattpeak), bisa menghidupi lampu 200

watt. "Dan hidup selama enam jam penuh setiap hari," kata Sudiartono. Lampu jalan bertenaga surya tergolong teknologi sederhana dan sudah dipakai di beberapa tempat terpencil di Yogyakarta.

Saat ini, PSE sedang menggarap pemakaian sinar matahari dan angin sebagai sumber listrik. Sistem Hybrid Surya Angin (HSA) ini, menurut Sudiartono, begitu populer di Eropa dan Amerika. Kanada, misalnya, serius menggarap HSA hingga bisa menjadi produk industri rumah. HSA, dirancang untuk daerah pesisir, menangkap sinar surya melalui panel dan angin melalui kincir. Angin menggerakkan turbin, yang mampu menghasilkan listrik untuk disimpan di baterai bersama setrum dari panel surya.

Aliran air pada parit, selokan, kanal, atau sungai juga jadi objek penghasil setrum. PSE kini sedang merancang pula generator pembangkit listrik mini, seukuran pompa air rumah tangga, yang bisa menghasilkan listrik meskipun dengan putaran turbin yang lemah. Alat ini memanfaatkan gerakan air yang dirancang dapat dipasang di aliran lemah sekalipun seperti irigasi persawahan. Jadi, banyak peluang memperoleh setrum, tak cuma bergantung pada PLN. □

SAWARIYANTO

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2006

HASIL AUDIT TARIF LISTRIK KELAR Maret, BPK Buka Borok Proyek PLN

Jakarta, RM. Jubir BPK Baharuddin Aritonang masih bungkam saat ditanya soal hasil audit BPK terhadap PLN, terutama yang menyangkut masalah harga pokok produksi (HPP) listrik PLN. Dijelaskan, sesuai aturan, hasil audit BPK akan diumumkan tanggal 7 Maret 2006, tidak bisa dibocorkan sekarang.

"Hasil audit BPK atas PLN termasuk soal HPP listrik akan kita umumkan 7 Maret, belum bisa saya jelaskan sekarang. Saya nggak berani bocorkan, takut kualat karena ini menyangkut rahasia negara. Tanya saja Pak Udju

yang jadi komandannya, sono!" katanya saat dikonfirmasi *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Baharuddin yang sedang berada di Jambi untuk ketemu Wagub Jambi Anthony Zedra Abidin itu meminta semua pihak mau bersabar dan tidak melakukan spekulasi yang membuat masyarakat resah. "Tunggu saja hasil audit BPK yang akan kita umumkan awal bulan depan," ajaknya.

Sementara seorang sumber *Rakyat Merdeka* di Mabas Polri, mengungkapkan, HPP listrik tersebut sebenarnya bisa ditekan. Asalkan, harga alat pembangkitnya tidak di-mark up. Yang terjadi saat ini, kabarnya karena mesin pembangkitnya banyak yang bekas, maka biaya penggunaannya juga makin tinggi. Hal inilah yang berpengaruh pada besaran harga pokok produksi (HPP) listrik. Ujung-ujungnya, berpengaruh pada tarif listrik.

Dimungkinkan, kata sumber ini, dalam HPP listrik akan ketahuan apakah dalam proyek pembangkit PLN tersebut terindikasi korupsi atau tidak. "BPK

pasti tahu itu," ungkap sumber ini.

Dalam audit nanti, BPK juga akan membongkar apakah ada mark up alat pembangkit 9,5 juta dolar AS. Seperti yang juga terjadi di PLTG Borang.

Ditanya, apakah TDL tidak akan naik karena harga minyak mentah di pasar internasional mengalami penurunan, Baharuddin menjelaskan, kecenderungannya TDL akan naik, tapi kenaikannya harus diperhitungkan sedemikian rupa supaya tidak terlalu membebani masyarakat. Kendati tidak berani menyebut berapa besar kenaikannya, tetapi kansnya naik sangat

besar, hal itu karena subsidiya sudah terlalu besar.

Menanggapi pernyataan Baharuddin Aritonang, baik Ketua API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Lily Asjudiredja maupun anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian sama-sama mendesak agar pemerintah tidak menaikkan TDL secara membabi buta.

"Pemerintah harus tahu sikon dan mampu menyelami suasana kebathinan rakyat dan pengusaha yang kini nafasnya megap-megap menjalani kehidupan yang makin berat ini. Pemerintah jangan bersikeras untuk mengamankan APBN, karena apalah artinya APBN aman kalau rakyat hidup seng-

sara," kata Lily Asjudiredja.

Dikatakan, dari hasil audit BPK akan diketahui berapa besarnya HPP listrik dan efisiensi yang bisa dilakukan PLN, terutama dengan dialihkannya penggunaan power plan dari BBM ke batubara. Pergantian itu tentu mengakibatkan penurunan biaya dan jika efisiensi bisa ditekan maksimal, maka kenaikan TDL —kalau terpaksa, red— tidak terlalu besar.

"Kalau tahu kemampuannya rakyat dan pengusaha menanggung kenaikan TDL hanya 10 persen, jangan memaksakan kenaikan lebih besar dari itu. Pemerintah harus mau berikan subsidi. Kalau kenaikannya terlalu besar lalu

pabrik tutup dan penangguran bertambah, pemerintah juga yang susah tho," kata Lily.

Anggota Komisi VII DPR Ramson S masih yakin dengan perkiraannya semula bahwa harga TDL tidak perlu naik tahun ini, karena dengan menurunnya harga minyak mentah di pasar internasional —dari 57 dolar AS menjadi se-

kitar 48-50 dolar AS per barel pada awal Maret ini, red—, akan mengakibatkan HPP (harga pokok penyediaan) listrik turun lebih dari Rp 10 triliun.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Fahmi Idris dan Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno mengungkapkan, kenaikan TDL akan berkisar 15-20 persen. ■ HPS/IMI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 4		TAHUN 2006

MARUAR: INIKAH PEMERINTAHAN YANG PRO-RAKYAT?

TDL Naik, Rakyat Tercekek

Penolakan atas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15-20 persen pada Mei-Juni mendatang, makin bergaung keras karena kebijakan itu sudah pasti akan makin mencekik rakyat. Sejumlah politisi Senayan pun bersuara keras: menolak kenaikan TDL.

Jakarta, RM

Ironisnya, rencana kenaikan TDL ini berhembus saat PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik, justru sedang disorot karena berbagai kasus korupsi dan ketidakmampuan direksi BUMN itu meraup laba dan bahkan terus merugi.

Menurut anggota Komisi VI DPR Syafrin Romas, ada kesan bahwa kenaikan TDL untuk menyelamatkan PLN yang merugi secara keuangan dan berbagai dugaan korupsi yang menyeret sejumlah direksi PLN. "Kesannya rakyat dibebani kenaikan TDL dengan alasan pemberian subsidi ke PLN. Padahal terjadi berbagai korupsi di PLN, lalu ada kerugian di PLN yang bebannya harus ditanggung masyarakat. Ini kan tidak fair," cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah direksi PLN telah diperiksa Mabes Polri terkait kasus dugaan mark up proyek PLTG Borang, Sumsel, yang diduga merugikan negara senilai Rp 122 miliar. Polisi sudah menahan tersangka Ali Herman Ibrahim (Direktur Pembangkitan dan Energi

PLN), Agus Darmadi (Deputi Direktur Pembangkitan PLN). Dirut PLN Eddie Widiono juga ikut terseret menjadi saksi.

Menurut Romas, pemerintah harusnya melakukan pembersihan ke dalam PLN lebih dulu sebelum menaikkan TDL. Atau memberikan tambahan subsidi sebesar Rp 7 triliun ke PLN.

"Masalahnya, berapapun subsidi yang diberikan ke PLN juga bisa dikorupsi. Dampaknya listrik naik lagi dan rakyat lagi yang menjadi korban," kecam Romas.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VI DPR lainnya Cecep Rukmana. Menurut Cecep, masyarakat saat ini masih trauma dengan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan inflasi semua bahan pokok.

"Pending" (tunda) dulu rencana kenaikan TDL. Ekonomi masyarakat belum pulih, apa harus menambah beban lagi? Saya khawatir kalau pemerintah nekat menaikkan TDL, akan terjadi gejolak," kata anggota Fraksi PAN itu.

Tak kalah garangnya, anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Ma-

ruarar Sirait menyebut pemerintah tidak kreatif karena hanya mampu menaikkan harga TDL dan BBM untuk menyelamatkan APBN. "Pemerintah hanya mampu menaikkan harga. Tidak kreatif. Yang menanggung beban hanya rakyat kecil, apa ini pemerintahan yang pro-rakyat?" teriak anak buah Megawati itu. ■ AUL

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI																												
		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : ..												TAHUN 2006																		

Dialokasikan Rp 23,5 Miliar untuk Listrik Gratis

BANDUNG, (PR)-

Di tengah rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), Pemprov Jawa Barat memberikan listrik gratis untuk keluarga miskin di desa-desa se-Jawa Barat. Untuk program itu disediakan anggaran Rp 23,5 miliar dalam APBD 2006.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Jawa Barat H. Ismail Hasjim, Minggu (26/2) di Bandung menjelaskan, pemberian listrik gratis dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga miskin yang ada di pedesaan.

Saat ini, masyarakat Jawa Barat

yang menikmati listrik baru mencapai 57%. Sedangkan sisanya, belum merasakan dan sebagian besar adalah keluarga miskin.

Tingginya angka yang belum menikmati listrik, demikian Ismail, ternyata mempengaruhi ekonomi mereka. Padahal, di antara mereka ada yang memiliki aktivitas ekonomi di rumah, seperti menjahit dan sebagainya.

Melihat kondisi itu, Gubernur Jawa Barat melalui Distamben menggulirkan program listrik pedesaan yang difokuskan bagi keluarga miskin. "Program ini telah digulirkan beberapa

tahun lalu dan untuk tahun sekarang sebagai kelanjutannya," kata Ismail.

Dana untuk pengembangan jaringan listrik pedesaan itu dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 23,5 miliar. Sedangkan listrik gratis yang akan diberikan yakni dengan daya 450 watt. Sasaran dari program listrik gratis itu menyebar di kabupaten/kota seperti di Sukabumi selatan, Cianjur selatan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, Banjar, Bogor dan lainnya.

Namun, Ismail tidak menyebutkan angka pastinya keluarga miskin yang akan menerima listrik gratis itu. "Yang

jelas, kriteria keluarga yang bisa mendapatkan listrik gratis, betul-betul keluarga miskin atau pra KS dan memiliki aktivitas perekonomian keluarga."

Disebutkan, tujuan utama pemberian listrik gratis, yakni mendorong perekonomian keluarga miskin. "Maksudnya, dengan diberikan listrik, maka aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan tanpa menggunakan aliran listrik, sekarang bisa dan itu memberikan nilai tambah," ujar Ismail.

Rekening tetap bayar

Sedangkan pengertian listrik gratis, lanjut Ismail, yakni gratis pemasangan aliran listrik dari

jaringan utama ke rumah, termasuk biaya pemasangan. "Untuk bayar rekening bulanan tidaklah gratis, melainkan ditanggung oleh keluarga yang bersangkutan," katanya.

Karena bersifat gratis, Ismail menjamin tidak ada pungutan atau biaya yang dikenakan kepada keluarga miskin yang akan mendapatkan listrik tersebut. "Program ini jangan sampai membebani keluarga miskin, melainkan membantu bagaimana ekonomi mereka bisa berkembang dan nantinya mengangkat posisi keluarga miskin," katanya. (A-134)***